

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan perkumpulan masyarakat hukum. Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa sangsekerta yaitu *Deca* yang berarti tanah air, tanah adat dan tanah kelahiran (Parlupi, 2020). Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Pusat, 2014). Oleh karena itu secara umum Desa dapat disimpulkan sebagai perkumpulan komunitas masyarakat berasal dari wilayah itu sendiri dan berada dibawah naungan hukum yang dipercaya oleh pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengurusan terhadap wilayah secara mandiri sehingga desa dapat menentukan arah perencanaan pembangunan berdasarkan asas partisipatif.

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan desa telah diatur dari turunan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. “ Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa". Pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa "Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota" (Negeri, 2014).

Sebagian dari seluruh desa di Indonesia dalam menata perencanaan pembangunan desa masih belum terlaksanakan dengan baik dan belum berkelanjutan, secara khusus setelah terjadi pergantian Kepala Desa, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi tidak terarah dan tidak berkelanjutan (Agustina, 2021). Hal tersebut menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap proses perencanaan pembangunan dikarenakan perencanaan pembangunan yang tidak memiliki fokus dan lokus sehingga menghambat kemajuan desa dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

Dalam merumuskan perencanaan pembangunan desa melalui potensi yang terdapat diwilayahnya menjadi tantangan yang cukup berat bagi pemerintah desa salah satu faktor penyebab ialah oleh karena sebagian dari kepala desa di seluruh Indonesia masih belum mengetahui proses perencanaan pembangunan desa meskipun telah melewati proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tetapi perencanaan pembangunan belum terlaksana dengan efektif dan belum memiliki infak secara berkelanjutan untuk masyarakat (Agustina, 2021). Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan belum memiliki fokus dan lokus sehingga belum mencapai tujuan

pembangunan dengan baik selain itu pemerintah berkomitmen dalam membangun desa seperti yang di tuangkan dalam Nawa cita, yaitu “Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan” (Wedhaswary, 2014). Oleh karena itu kemiskinan menjadi masalah yang sebaiknya diselesaikan oleh pemerintah , dikarenakan kemiskinan menjadi faktor penghambat untuk pemerintah desa dapat merealisasikan perencanaan pembangunan hal ini bertujuan sebagai meningkatkan desa mandiri dan mengurangi desa tertinggal (Arifah, Mir’atun Nur, 2018).

Fenomena kemiskinan menjadi hal penting untuk diselesaikan dikarenakan masalah kemiskinan menjadi penghambat bagi pemerintah desa untuk merealisasikan perencanaan pembangunan desa. Kejelian pemerintah dalam implementasi setiap kebijakan otonomi desa hendaknya diarahkan pada potensi-potensi yang dimiliki desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (Suprayitno, 2015).

Potensi desa dan kesejahteraan masyarakat menjadi satu komponen dalam menyelesaikan masalah kemiskinan sehingga potensi desa perlu untuk dioptimalkan oleh pemerintah desa guna untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan harapannya dapat memberikan peningkatan kemakmuran masyarakat. Pengelolaan potensi yang belum begitu optimal akan memberikan dampak keterlambatan kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat (Redaksi, 2021). Kebergantungan pemerintah desa kepada pemerintah pusat terus menjadi fenomena yang menjadikan masyarakat sulit untuk memajukan diri sendiri meskipun masyarakat memiliki sumberdaya alam yang dapat dikembangkan dan

dimanfaatkan namun hal tersebut belum di manfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa.

Banyak Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul yang akhir-akhir ini sedang mengembangkan potensi desa untuk dijadikan tempat wisata baik wisata alam, kuliner, dan desa wisata, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh dinas pariwisata Kabupaten Gunungkidul ada sebanyak 27 kalurahan yang mengajukan agar dapat ditetapkan menjadi desa wisata kepada bupati Gunungkidul (Rahmat, 2019). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Pengunjung/ wisatawan dari Nusantara maupun Domestik dan Wisatawan Mancanegara yang banyak berdatangan, pada tahun 2018 sebanyak 3.040.095 jiwa dan pada tahun 2019 sebanyak 3.267.497 jiwa data yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul artinya wisatawan yang berkunjung setiap tahun nya mengalami peningkatan. Namun Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul sebesar 17,07%; atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 16.61% Sumber: BPS Kab. Gunungkidul (Statistik, 2021). Hal tersebut menunjukan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan masih kurang efektif sehingga angka kemiskinan masih mengalami kenaikan padahal banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan data wisatawan yang berkunjung untuk menikmati keindahan alam Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Kampung yang merupakan salah satu Kalurahan yang berada di Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Suparna, S.E

selaku kepala Kalurahan Kampung, bapak Suparna menjelaskan bahwa “Kalurahan Kampung memiliki potensi pertanian dan potensi alam yang cukup luas yang bisa dikembangkan, namun hal tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa dikarenakan proses perencanaan pembangunan dalam pelaksanaanya masih belum efektif”. (wawancara pada tanggal 03 Desember 2021).

Kemudian informasi yang disampaikan oleh bapak Yohanes Budi Winarso selaku Kaur Perencanaan Kalurahan Kampung, Bapak Budi menjelaskan tentang “proses perencanaan sampai pada pembangunan terkendala oleh Anggaran Dana Desa (ADD) yang diterima sehingga fokus dan lokus penggunaan anggaran sudah tidak terarah”. Lebih lanjut penjelasan bapak Budi bahwa “dalam merencanakan memang sudah melewati musdus (musyawarah dusun) dan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan)”. Bapak Budi juga menyampaikan “bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat aktif hal tersebut dikarenakan pada saat musyawarah dusun, masyarakat padukuhan sudah menyiapkan program - program yang akan direncanakan dan disampaikan pada saat musrenbang sehingga Kalurahan Kampung memiliki banyak program yang direncanakan tetapi terhambat oleh anggaran dana desa”. (wawancara pada tanggal 03 Desember 2021). Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan perencanaan pembangunan menjadi kurang efektif dikarenakan untuk anggaran dana desa yang diterima sudah memiliki plot penggunaannya tetapi dengan adanya wabah *pandemic Coronavirus disease 2019* dan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2022 sehingga sekitar 40% dari anggaran dana kalurahan digunakan untuk penanganan pandemi covid- 19. Hal tersebut menyebabkan perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan musdus dan musrenbang sampai pada proses pelaksanaannya terkendala oleh Anggaran Dana Desa tersebut. Artinya Anggaran Dana Desa menjadi faktor penghambat pada pelaksanaannya dalam proses perencanaan pembangunan Kalurahan dikarenakan anggaran yang diterima sudah dibagi berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk memilih topik pengajuan judul penelitian tentang **Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat di Kalurahan Kampung?
2. Apa saja hambatan dalam proses perencanaan pembangunan di Kalurahan Kampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah :

- 1.1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses perencanaan pembangunan di Kalurahan Kampung.
- 1.2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam merumuskan perencanaan pembangunan di Kalurahan Kampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai dukungan pemahaman dan pemikiran pengembangan ilmu pemerintahan dalam proses perencanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur masyarakat berdasarkan asas partisipatif dalam menyerap aspirasi masyarakat secara melibatkan dan dilibatkan dan penyesuaian terhadap visi misi kepala desa terpilih untuk pelaksanaan pembangunan.
2. Secara praktis
 - a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur, yang memuat ide dan gagasan yang bermanfaat tentang proses perencanaan pembangunan partisipatif.
 - b. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi *knowledge tranformation* secara pengetahuan dan sebagai acuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan dapat menjadikan kemandirian desa melalui proses perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat.
 - c. Bagi peneliti dapat memberikan pemahaman dan ilmu baru kepada peneliti tentang perencanaan pembangunan partisipatif oleh semua unsur masyarakat yang terlibat dalam menentukan pelaksanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

1.1. Sistematika Bab

1. Bab I merupakan bagian dari pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian baik secara teoritis maupun praktis.
2. Bab II merupakan tinjauan pustaka. Pada bagian bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.
3. Bab III merupakan metodeologi penelitian. Pada bagian ini peneliti menguraikan tentang jenis penelitian, metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.
4. Bab IV merupakan bab pembahasan penelitian yang menguraikan tentang hasil penelitian dan hasil analisis peneliti dengan cara menyajikan fakta yang berupa data yang ditemukan dilapangan terhadap proses perencanaan pembangunan dan serta peneliti menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat proses perencanaan pembangunan.
5. Bab V merupakan bagian penutup pada penulisan penelitian ini yang menjadi langkah akhir dari keseluruhan yang berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap perencanaan pembangunan.